



HUMAS/JOGLO JOGJA

PAPARKAN: Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo saat menghadiri koordinasi tim pengawasan perizinan di Grand Kangen, kemarin.

## Tingkatkan Kualitas, 40 Usaha Dilakukan Pengawasan Perizinan

KOTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melakukan pengawasan perizinan berusahanya kepada sebanyak 40 unit usaha di tahun ini. Hal itu untuk meningkatkan kualitas suatu unit usaha.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo men-

gungkapkan, nantinya Tim Pengawas Perizinan Berusaha harus memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaannya di lapangan. Termasuk dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Transparansi, integritas dan akuntabilitas, menjadi komitmen

bersama yang harus dijaga berkaitan dengan penerbitan izin dan pengawasan perizinan berusaha. Termasuk memberikan pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terkait izin apa saja yang harus dipenuhi, sesuai jenis usaha dan risiko yang dijalankan," paparnya.

■ Baca **TINGKATKAN... Hal II**

# Tingkatkan Kualitas, 40 Usaha Dilakukan Pengawasan Perizinan

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan, tahun ini hanya ada 40 unit usaha yang dilakukan pengawasan perizinan. Jumlah itu turun lantaran ada beberapa yang sudah melaksanakan sesuai ketentuan.

"2023 kami mengawasi seki-

tar 68 unit usaha yang terbagi lima bidang, yaitu 13 bidang kesehatan, 22 pariwisata, tiga pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, 29 perdagangan dan satu ketenagakerjaan," ungkapnya.

Sedangkan, sejauh ini telah menerbitkan 26.878 Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 60 persen jumlah penduduk usia produktif jika

dirata-rata jumlah pelaku usahanya sudah mencapai angka 11,19 persen.

"Dari 400 ribu lebih penduduk Kota Yogyakarta, ada sekitar 240 ribu usia produktif dari NIB yang sudah diterbitkan maka tercapai 11,19 persen. Angka ini cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,74 persen. Di mana suatu negara atau

daerah dikatakan maju ketika pelaku usahanya di atas 12 persen," jelasnya.

Lebih lanjut, nantinya beberapa perangkat daerah teknis yang akan ada di Tim Pengawas membidangi jenis usaha tertentu. Seperti bidang kesehatan, pariwisata, pekerjaan umum, perdagangan ketenagakerjaan, serta Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. (riz/sam)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005